

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Proses kehidupan manusia melalui beberapa tahapan, mulai dari lahir, tumbuh dan berkembang, melangsungkan keturunan dan hidup menikmati usia senja. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia sesuai dengan takdirnya akan masuk ke dalam tahap usia senja, saat usia sudah tidak lagi produktif dan hanya mampu berkegiatan secara terbatas dan mengharapkan kehidupan yang damai. Sesuai dengan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang tujuan Bangsa Indonesia, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, menjadi landasan pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan *Good Governance*. Agar tujuan tersebut dapat terwujud secara optimal maka masyarakat lanjut usia hendaknya menjadi fokus sasaran yang harus diperhatikan pemerintah agar mampu mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bahwa seseorang dengan usia yang telah mencapai sama dengan 60 (enam puluh) tahun ke atas telah dapat dikategorikan sebagai lanjut usia (Primadi, 2013; Ekasari, 2018; Halimsetiono, 2021). Adanya pengkategorian terhadap ambang batas lanjut usia tersebut adalah agar masyarakat yang masih berada di bawah umur dapat terus

bekerja secara produktif dan tidak bergantung secara dini terhadap bantuan pemerintah. Lanjut usia bukan berarti tidak mendapat kesamaan hak dengan masyarakat lainnya (Halimsetiono, 2021). Indonesia menjamin kesamaan hak dalam berkehidupan bermasyarakat yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia juga merupakan bagian dari percepatan pembangunan yang baik agar nantinya harapan hidup masyarakat turut meningkat sehingga memperkecil angka kematian penduduk.

Pembangunan tidak hanya tertuju pada proses kegiatan pemerintah untuk melakukan pemenuhan sarana prasarana secara merata, melainkan juga turut melindungi, mengembangkan, serta memenuhi hak Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pencapaian kesejahteraan yang lebih optimal. Perlindungan penduduk lanjut usia menjadi sebuah isu permasalahan penduduk yang kerap mendapat perhatian dan menjadi konsentrasi tersendiri untuk mendorong terjadinya peningkatan pada Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan nasional (Dinda & Fitra, 2017). Apalagi mengingat bahwa masih belum adanya pemihakan perlindungan sosial yang adil terhadap kelompok khusus, salah satunya penduduk lanjut usia. Isu tersebut juga sesuai dengan misi yang ingin dicapai Presiden pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 bahwa seluruh warga Indonesia mendapatkan perlindungan dan keamanan secara adil tanpa terkecuali oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi karena semakin kecilnya angka kematian saat kelahiran dan tingginya angka

kelahiran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 berjumlah kurang lebih 273,5 juta (BPS, 2021a). Dari jumlah penduduk total tersebut, penduduk lanjut usia masuk ke dalam kategori penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut merupakan data mengenai penduduk lanjut usia di Indonesia:

Tabel 1. 1

Persentase Penduduk Lanjut Usia di Indonesia Tahun 2010-2022

Tahun	Jumlah	Persentase	Kenaikan Persentase
2010	18.352.620	7,59%	
2020	26.748.300	9,78%	2,19%
2022	31.320.066	10,48%	1%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas, dapat terlihat bahwa terdapat sejumlah kenaikan pada penduduk lanjut usia di Indonesia yang diawali pada tahun 2010 berjumlah 18,3 juta atau 7,59 persen dari 241,8 juta penduduk. Selanjutnya, di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, penduduk lansia tersebut meningkat kembali menjadi 267 juta atau 9,78 persen dari 273,5 penduduk. Dengan demikian, melalui hasil dari persentase tersebut, dapat dipastikan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu (BPS, 2021a). Adanya peningkatan penduduk lanjut usia tersebut membuat Indonesia sudah masuk sebagai negara yang menyandang kategori sebagai negara berstruktur tua karena persentase penduduk lanjut usia yang telah mencapai 10 persen atau lebih proporsi lansia di Indonesia (Adiotetomo & Elda, 2018; Hakim, 2020).

Peningkatan masyarakat lanjut usia ini menjadikan Indonesia mengalami transisi ke era *ageing population* yang merupakan penuaan penduduk dan menjadi salah satu isu permasalahan kependudukan di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang (Heryanah, 2015; Lestari, 2016; Suriastini, 2013; Hermawati 2015; Ruza, 2015; Ariwibowo, 2019). *Ageing population* telah menjadi isu hangat yang menarik perhatian dunia. Berdasarkan data dari *World Population Data Sheet* yang dilansir dari *Population Reference Bureau* (PRB), tahun 2012 akan terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia dengan usia 65 tahun ke atas dengan jumlah 564 juta jiwa atau persentase 8% dengan jumlah penduduk dunia berkisar 7 milyar penduduk. Fakta menarik yang didapat adalah penduduk lansia dengan persentase 53% tersebut berada di negara-negara Asia (Sari & Susanti, 2017). Isu tersebut menjadi sebuah perhatian yang menarik karena ternyata fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara Eropa yang menghadapi *less population*. Benua Asia, yaitu Negara China yang ditetapkan sebagai negara dengan jumlah penduduk paling tinggi di dunia pun turut menghadapi permasalahan tersebut seperti negara-negara Eropa (Haryanto, 2015).

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang diindikasikan memiliki pertumbuhan lansia yang lebih cepat. Mengingat bahwa jumlah dan proporsi penduduk lansia meningkat setiap tahunnya, ditambah lagi dengan fakta bahwa ternyata Indonesia juga menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah populasi 60 tahun ke atas sejumlah 25 juta, setelah China dengan jumlah 200 juta dan India dengan jumlah 100 juta. Menanggapi fenomena kenaikan tersebut dapat diindikasikan bahwa nantinya pada tahun 2050, penduduk lanjut usia di Indonesia diperkirakan

akan mencapai angka 100 juta penduduk (Hermawati, 2015; Hendrawanto, 2016). Selain itu, Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia mengalami peningkatan. Berikut merupakan data mengenai Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia:

Tabel 1. 2
Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia

Tahun	UHH	Persentase	Kenaikan Persentase
1990	63,18 tahun	6,4%	
2000	64,5 tahun	7,18%	0,78%
2010	69,43 tahun	7,56%	0,38%
2020	71,74 tahun	9,78%	2.22%
2022	71,85 tahun	10,48%	0,7%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa kondisi Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia terus membaik setiap tahunnya. Pada tahun 1990, Usia Harapan Hidup (UHH) Indonesia adalah 63,18 tahun (dengan persentase populasi lansia 6,4%). Selanjutnya pada tahun 2000 adalah 64,5 tahun (dengan persentase populasi lansia 7,18%). Selanjutnya, pada tahun 2010, meningkat menjadi 69,43 tahun (dengan persentase populasi lansia 7,59%) dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,74 tahun (dengan persentase populasi lansia 9,78%). Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 71,85 tahun (dengan persentase populasi lansia 10,48%) (Hermawati, 2015; Primadi 2013). Apabila memperhatikan kembali data yang telah diuraikan, Indonesia menjadi salah satu jajaran negara yang mengalami penuaan penduduk karena porsi penduduk lansia dengan usia 60 tahun ke atas sudah mencapai 10% atau lebih sehingga persentase tersebut menjadi sebuah tanda dari kategori negara yang mengalami penuaan penduduk (Ainistikmalia, 2019).

Indonesia saat ini memiliki isu permasalahan kependudukan yang salah satunya adalah bonus demografi, yaitu di saat proporsi usia produktif mengalami peningkatan dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (Haryanto, 2015; Falikhah, 2017; Prakarsa, 2020). Secara garis besar apabila pemerintah mampu memanfaatkan kesempatan bonus demografi tersebut dengan baik akan memberikan keuntungan ekonomis karena penduduk produktif tersebut dapat menjadi salah satu investasi pemerintah dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, apabila pemerintah tidak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut, secara tidak langsung Indonesia akan mengalami permasalahan penduduk yang kian kompleks, seperti peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya (Falikhah, 2017).

Pembahasan mengenai peningkatan penduduk lanjut usia ini masuk ke dalam bonus demografi kedua, yang diartikan sebagai proporsi penduduk usia lanjut semakin tinggi, tetapi masih produktif (Prakarsa, 2020; Haryanto, 2015; Heryanah, 2015). Meski terdengar menguntungkan karena perekonomian Indonesia terbantu akibat penduduk lanjut usia yang masih produktif, ternyata hal ini juga memberikan permasalahan di kemudian hari. Permasalahan tersebut berupa penduduk usia produktif saat ini memiliki beban yang lebih besar di kemudian hari karena mereka akan menanggung beban para penduduk usia non produktif (Falikhah, 2017; Haryanto, 2015; Hermawati, 2015) .

Terlebih lagi ternyata Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang memberikan sumbangan masyarakat lanjut usia tertinggi mengingat bahwa jumlah

penduduk di provinsi tersebut juga tergolong tinggi. Berikut merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021:

Tabel 1. 3
Jumlah Penduduk Jawa Tengah.

Tahun	Jumlah Penduduk Jawa Tengah	Pertumbuhan
2020	36,52 juta	
2021	37,23 juta	0,71 juta (1,94%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Berdasarkan data pada tabel 1.3 tersebut, jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu dari 36,52 juta menjadi 37,23 juta jiwa atau naik sebesar 1,94%. Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memiliki penduduk berkisar kurang lebih 1,653 juta pada tahun 2020 serta mengalami kenaikan menjadi 1,656 juta pada tahun 2021 dan menduduki peringkat ke-4 setelah Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas (BPS, 2021a). Berikut merupakan data mengenai jumlah penduduk pada tahun 2021 di Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kota Semarang:

Tabel 1. 4
Jumlah Penduduk Terpadat di Jawa Tengah Tahun 2020-2021

No	Nama	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Jumlah Penduduk Tahun 2021
1	Kabupaten Brebes	1.978.759 jiwa	1.992.685 jiwa
2	Kabupaten Cilacap	1.944.857 jiwa	1.963.824 jiwa
3	Kabupaten Banyumas	1.776.918 jiwa	1.789.630 jiwa
4	Kota Semarang	1.653.524 jiwa	1.656.564 jiwa

Sumber: BPS, 2021.

Berdasarkan tabel 1.4, dapat terlihat bahwa Kota Semarang menduduki peringkat ke empat dengan jumlah penduduk terpadat di Jawa Tengah. Jumlah penduduk tersebut mengakibatkan penduduk lanjut usia di Kota Semarang juga mengalami peningkatan. Kenaikan penduduk lanjut usia tersebut dapat dilihat melalui data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Kenaikan Jumlah Penduduk Lansia di Kota Semarang
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Lansia		Pertumbuhan
2016	8,17 %	141.000 jiwa	
2017	8,47 %	148.000 jiwa	7000 jiwa
2018	8,78 %	156.900 jiwa	8900 jiwa
2019	9,11 %	165.300 jiwa	8400 jiwa
2020	9,29 %	170.200 jiwa	4900 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.

Peningkatan yang ditunjukkan pada tabel 1.4 tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya kemajuan pada bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang membuat Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk lanjut usia turut meningkat (Rahmahida, 2020; Halimsetiono, 2021; Ruza, 2015; Hermawati 2015, Ariwibowo 2019). Secara garis besar, kemajuan tersebut adalah salah satu bentuk keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Namun, kualitas kehidupan masyarakat yang meningkat ini menimbulkan isu permasalahan baru, yaitu penduduk lanjut usia perlu dilindungi oleh pemerintah baik, dari segi kesehatan fisik maupun non fisik dan turut memberikan keamanan dalam menjalani kehidupan yang mandiri dan menyenangkan (Ruza, 2015; Suriastini, 2013). Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah dengan perkembangan yang pesat dan memiliki jumlah lansia yang cukup tinggi belum mengoptimalkan hal tersebut.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998, disebutkan bahwa pemenuhan hak lansia meliputi: (1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) pelayanan kesehatan; (3) pelayanan kesempatan kerja; (4) pelayanan pendidikan dan pelatihan; (5) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; (6) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; (7) perlindungan sosial; dan (8) bantuan sosial (Hermawati, 2015).

Guna meningkatkan pelayanan serta perlindungan terkait dengan penduduk lanjut usia, dikeluarkanlah secara resmi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (2017). Tujuan dikeluarkannya kebijakan Kota Ramah Lansia adalah untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan kepada para penduduk lanjut usia tanpa ada batasan pelayanan. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang telah meneliti tentang Kota Ramah Lansia di beberapa kota. Pertama, penelitian terdahulu oleh Dinda & Fitra (2017) yang berjudul “Kesiapan Pembangunan Kota Metro Menuju Kota Ramah Lansia (*Age Friendly City*) Studi Kasus: Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro”. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Kota Metro sudah siap menjadi Kota Ramah Lansia dengan adanya pemenuhan indikator yang sesuai dengan WHO.

Selanjutnya, Kota Yogyakarta dalam penelitian terdahulu oleh Hermawati (2015) yang berjudul “Kajian Tentang Kota Ramah Lanjut Usia” membahas mengenai upaya perwujudan Kota Ramah Lansia oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa Kota Yogyakarta memperlihatkan tingkat kesesuaian dan pemenuhan kriteria untuk menjadi Kota

Ramah Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan WHO. Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh Suriastini (2013) yang berjudul “Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia, Kota Ramah Lanjut Usia 2030 Kota Malang”. Penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa Kota Malang perlu melakukan peningkatan dan pembenahan baik dari segi infrastruktur maupun pengimplementasian kebijakan yang berkaitan dengan lansia agar perwujudan Kota Ramah Lansia dapat tercapai dengan optimal dan segera terwujud. Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian oleh Lestari (2016) yang berjudul “Menuju Denpasar Ramah Lansia” bahwa peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan perlu diperhatikan.

Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh Vibriyanti (2018) yang berjudul “Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang dan Tantangan”. Penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa peluang yang didapatkan oleh Kota Surabaya cukup besar untuk mampu menyanggah gelar Kota Ramah Lansia karena ia telah memenuhi syarat-syarat Kota Ramah Lansia menurut WHO, seperti peraturan daerah lansia, tersedianya kelompok/kelembagaan terkait lansia, dan komitmen kepala daerah yang tinggi dan memiliki beberapa hambatan yang harus segera diatasi untuk ke depannya. Kota Semarang masuk ke dalam jajaran kota yang telah menjadi *sample* pada Studi Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia 2013 yang dilakukan di 14 kota di Indonesia dan berusaha mewujudkan Kota Ramah Lansia (Suriastini, 2013).

Studi tersebut dilakukan oleh SurveyMeter dan *Center for Ageing Studies* (CAS), Universitas Indonesia (UI) yang didanai oleh *Knowledge Sector*, Australian Aid yang dikelola oleh *The Asia Foundation* pada tahun 2013 mengingat bahwa

Kota Semarang memiliki Persentase jumlah lansia yang cukup tinggi. Hasil penelitian tersebut menggambarkan keadaan di kota besar, menengah, dan kecil mengenai penciptaan kota yang ramah untuk lansia. Oleh karena itu, adanya studi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk membuat kebijakan Kota Ramah Lansia tahun 2030 kepada para pemerintah daerah. Pembahasan mengenai usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia juga disajikan dalam penelitian Bappeda (2018) yang berjudul “Kajian Kota Semarang Menuju Kota Ramah Lansia”. Di sini Kota Semarang berusaha untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia meski belum memiliki kebijakan yang terfokus kepada hal tersebut. Pembahasan mengenai Kota Ramah Lansia di Kota Semarang telah dilakukan sejak tahun 2013 dan melalui penelitian Bappeda (2018) dapat terlihat perkembangan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang yang berusaha diwujudkan.

Dengan demikian, melalui uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan pendalaman terhadap kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari perkembangan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi serta mengetahui langkah selanjutnya dari perkembangan kebijakan publik pemerintah Kota Semarang yang telah dilakukan agar nantinya Kota Ramah Lansia dapat segera terwujud dan memberikan peningkatan kesejahteraan penduduk lanjut usia. Oleh karena itu, penulis menganalisis problematika yang ada, mengurainya, dan

memberikan solusi dalam penelitian yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA RAMAH LANSIA”**

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan pertanyaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kebijakan publik pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia?
2. Apa faktor penghambat dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di telah diuraikan di atas maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perkembangan kebijakan publik pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia.
2. Menganalisis faktor penghambat dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang.

1. 4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang dapat menunjang dunia akademik maupun dalam kehidupan bermasyarakat, di antaranya:

1. 4. 1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan pada bidang keilmuan yang dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk memperluas wawasan baru

melalui riset ilmiah di bidang Administrasi Publik, khususnya bidang kebijakan publik.

1. 4. 2 Kegunaan praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta mampu lebih kritis terhadap persoalan yang terdapat di masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih cepat tanggap dan peka terhadap lingkungan agar nantinya mampu memberikan ruang nyaman untuk para lansia menjalani aktivitas.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang agar nantinya dapat mengatasi permasalahan tersebut demi terwujudnya tujuan SDGs serta peningkatan kesejahteraan penduduk lanjut usia.

1. 5 Kajian Teori

1. 5. 1 Penelitian Terdahulu

Bab ini akan melakukan riset pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian satu dengan penelitian yang lain seyogyanya memiliki sifat yang berkesinambungan dan terhubung sehingga diharapkan dapat menjadi bukti pendukung dari informasi dan data valid yang telah didapatkan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 1. 6
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Artikel, Tahun	Tujuan	Hasil/Temuan
Kota Ramah Lansia			
1	Oriza Husna Lativa, Winny Astuti, Hakimatul Mukaromah, 2021 Aksesibilitas Fisik Puskesmas Ramah Lansia Menuju <i>Age Friendly City</i> Kota Yogyakarta.	Mengetahui aksesibilitas fisik pada puskesmas ramah lansia untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang ramah lansia.	Perlu peningkatan dukungan transportasi (perbaikan aksesibilitas dengan akses rute angkutan umum, lokasi halte, kualitas kondisi jalur pejalan kaki, dan penyediaan ruang parker prioritas).
2	Natalia Dinda K.P, Helmia Adita Fitra, 2017. Kesiapan Pembangunan Kota Metro Menuju Kota Ramah Lansia (<i>Age Friendly City</i>) Studi Kasus: Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro	Pengkajian kesiapan Kota Metro dalam perwujudan kota yang ramah lansia dengan adanya pemberian dorongan secara penuh dari di Kecamatan Metro Pusat	Dengan kategori kesiapan pada aspek transportasi, memberikan peluang lansia untuk berpartisipasi sipil dan juga pekerjaan, komunikasi dan informasi, partisipasi sosial, serta memberikan penghormatan hingga penghargaan dari lingkungan sosial kepada para penduduk lanjut usia menjadikan Kota Metro siap menjadi Kota Ramah Lansia
3	Safuri Musa, 2016 Kajian Kota Ramah Lansia Di Kota Bekasi	Perekomendasi tentang model untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Bekasi sebagai landasan para pemerintah dalam penyusunan kebijakan agar nantinya sistem	Kota Bekasi dapat mengembangkan metode <i>holistic</i> dan <i>integrative</i> yang partisipatif kolaboratif dalam

No	Nama, Judul Artikel, Tahun	Tujuan	Hasil/Temuan
		penganggaran, pembuatan program, maupun penyusunan RAD dapat berjalan dengan optimal.	mewujudkan Kota Ramah Lansia. Dalam melaksanakan Kota Ramah Lansia, pemerintah daerah diharapkan dapat melibatkan berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta, komunitas, dan sebagainya untuk memainkan peran masing-masing sesuai dengan Delapan Indikator Kota Ramah Lansia.
4	Made Diah Lestari, 2016. Menuju Denpasar Ramah Lansia	Untuk mengetahui apakah Kota Denpasar sudah siap menjadi Kota Ramah Lansia.	Membutuhkan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dan dukungan dari aspek sosial agar kesejahteraan penduduk lanjut usia dapat terwujud dengan baik.
5	Istiana Hermawati, 2015 Kajian Tentang Kota Ramah Lanjut Usia	Pemberian masukan terhadap komitmen pemerintah kota dalam menciptakan kota, salah satunya Yogyakarta yang ramah lanjut usia.	Kota Yogyakarta dikategorikan sebagai kota dengan nilai yang cukup baik untuk disebut sebagai kota yang telah memenuhi kriteria Kota <i>Age Friendly City</i> yang telah ditetapkan oleh WHO dan mengungguli kota-kota lain.
6	Tine Buffel, Chris Philipson, 2016 <i>Can global cities be 'age-friendly cities'?</i> <i>Urban development and</i>	Mengetahui beberapa argumen dibalik Pengembangan Kota Ramah Lansia menurut WHO hingga faktor yang mempengaruhi, dan mengidentifikasi tantangan dalam meningkatkan lingkungan yang ramah untuk lansia melalui	Implementasi kebijakan Kota Ramah Lansia memiliki 3 tantangan, di antaranya: 1. Dampak pemotongan keuangan pada program sosial

No	Nama, Judul Artikel, Tahun	Tujuan	Hasil/Temuan
	<i>ageing populations</i>	perspektif sosiologi dan perkotaan.	2. Tekanan yang timbul dari karakteristik perkembangan perkotaan 3. Pergeseran menuju privatisasi ruang kota.
7	Jacobo Ruzaa, Jung In Kim, Ivan Leung, Calvin Kam, Sandy Yee Man Ng, 2015 <i>Sustainable, age-friendly cities: An evaluation framework and casestudy application on Palo Alto, California</i>	Mengembangkan kerangka kerja yang menyediakan struktur sistematis untuk mengevaluasi Kota Ramah Lansia berdasarkan pedoman WHO dan dilengkapi dengan penelitian tambahan.	Kota Ramah Lansia sangat dibutuhkan dan Kota Palo berusaha meningkatkan ruang terbuka, transportasi umum, dan layanan kesehatan untuk lansia agar lansia dapat terberdaya secara merata.
8	Dr. Ni Wayan Suriastini, M.Phil., Bondan S. Sikoki, SE., MA., Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, dkk., 2013. Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia, Kota Ramah Lanjut Usia 2030 Kota Malang	Mengetahui persepsi penduduk lansia dan pra lansia serta pemerintah daerah yang bersangkutan langsung dalam menangani lansia tentang kesesuaian antara kota yang dijadikan percontohan dengan indikator Kota Ramah Lansia yang telah ditentukan oleh WHO. Memberikan rekomendasi terhadap pemerintah agar dapat membentuk kebijakan untuk menyambut Kota Ramah Lansia tahun 2030	Kota Malang perlu melakukan peningkatan dan pembenahan baik dari segi infrastruktur maupun pengimplementasian kebijakan agar dapat berjalan dengan baik.

No	Nama, Judul Artikel, Tahun	Tujuan	Hasil/Temuan
9	Jorge J. Lambrinos, 2013. <i>Age-Friendly Living in Guanajuato, Mexico</i>	Mengetahui cara meningkatkan layanan kepada lansia di kota dan menciptakan kota yang nyaman sehingga mampu menarik wisatawan lansia dari negara lain.	Diperlukan kerjasama yang baik, dari pembuatan kebijakan secara jangka panjang hingga menyiapkan beberapa keperluan untuk lansia seperti melihat ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan, ruang terbuka hijau, dan area lain di daerah Guanajuato agar penduduk memperoleh manfaat yang optimal.
10	Andrew E. Scharlach, 2012 <i>Creating Aging-Friendly Communities</i>	Melihat perkembangan Kota Ramah Lansia melalui pembentukan komunitas lansia di kota.	Komunitas ramah lansia menjadi salah satu pendorong utama untuk mengembangkan Kota Ramah Lansia yang baik dan optimal.
11	Deshinta Vibriyanti, 2018 Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang Dan Tantangan	Menganalisis peluang dan hambatan yang ditemui oleh Kota Surabaya untuk mampu menyandang predikat Kota Ramah Lansia.	Peluang yang dimiliki oleh Kota Surabaya cukup besar karena memenuhi syarat-syarat yang dikategorikan oleh WHO. Akan tetapi, terdapat tantangan yang harus segera diatasi untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia, seperti perbaikan fasilitas fisik, peningkatan kesempatan kerja untuk lansia dan komitmen hingga aksi nyata.
Bonus Demografi dan Ageing Population			
12	Heryanah, 2015 <i>Ageing Population dan Bonus</i>	Penggambaran dari berbagai isu demografi berdasarkan data dari proyeksi penduduk di negara Indonesia pada	Indonesia perlu mempersiapkan program yang mendukung kondisi kependudukan dalam

No	Nama, Judul Artikel, Tahun	Tujuan	Hasil/Temuan
	Demografi Kedua Di Indonesia	tahun 2010-2035 mendatang sehingga perlu dipersiapkan.	menghadapi Bonus Demografi Kedua.
13	Joko Tri Haryanto, 2015 Penduduk Lansia dan Bonus Demografi Kedua	Penggambaran bonus demografi kedua yang menjadi isu demografi baru di Indonesia dan menjadi rekomendasi pemerintah untuk mampu menciptakan program sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat di Indonesia	Pemerintah harus mampu menciptakan berbagai program sebagai upaya peningkatan kualitas SDM agar nantinya dapat mendukung pembangunan nasional.
14	Nur Falikha, 2017 Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia	Penggambaran peluang dan hambatan yang akan dihadapi oleh Indonesia di tahun-tahun mendatang sehingga pemerintah perlu melakukan persiapan yang lebih baik untuk ke depannya.	Indonesia memiliki dua sisi, yaitu potensi dan ancaman dalam menghadapi bonus demografi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menggunakan potensi tersebut supaya penduduk, terutama generasi muda memiliki kesadaran untuk mulai memperhatikan isu-isu atau permasalahan dalam kependudukan
15	Eka Afrina Djamhari et.al., 2020 Laporan Riset (Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia)	Melakukan analisis kebijakan dan program perlindungan sosial lanjut usia yang telah diadopsikan diselenggarakan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.	Diperlukannya seperangkat peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan lansia sebagai payung hukum pelaksanaan program untuk lansia, perlu memperbaharui kebijakan mengenai Komnas Lansia, pemerintah daerah perlu memprioritaskan lansia dalam kebijakan jaring keamanan, pemerintah harus melakukan

No	Nama, Judul Artikel, Tahun	Tujuan	Hasil/Temuan
			penguatan dan melakukan perluasan cakupan penerima perlindungan lansia secara universal, dll.

Sumber: Olahan Penulis, 2022.

Berdasarkan tabel 1.5, dapat terlihat bahwa sudah banyak kajian yang membahas mengenai Kota Ramah Lansia. Beberapa di antaranya masuk ke dalam jajaran kota yang menjadi percontohan Kota Ramah Lansia di masa mendatang. Di bawah ini merupakan uraian mengenai penelitian terdahulu tersebut:

Pertama dimulai dari penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia dengan melakukan penilaian di bidang aksesibilitas fisik puskesmas yang ramah lansia dan menemukan hasil bahwa jarak antara pelayanan puskesmas yang diperuntukkan bagi para lansia dan pelayanan sistem jaringan transportasinya sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan (Lativa, 2021). Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian Hermawati (2015) yang membahas tentang perwujudan Kota Ramah Lansia dengan studi kasus di Yogyakarta. Perbedaan dari penelitiannya terletak pada penilaian Kota Ramah Lansia yang menggunakan empat syarat Kota Ramah Lansia menurut WHO. Dengan demikian, kedua penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki kesamaan penelitian Vibriyanti (2018). Penelitian Vibriyanti membahas tentang Kota Surabaya menuju Kota Ramah Lansia. Persamaan tersebut dilihat dari penilaian Kota Ramah Lansia melalui empat syarat menurut WHO dan juga melihat dari indikator yang disediakan oleh WHO.

Penelitian tentang Kota Ramah Lansia juga dilakukan di Kota Metro dengan memfokuskan lima dari delapan indikator Kota Ramah Lansia menurut WHO. Penelitian ini menghasilkan Kota Metro memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menjadi Kota Ramah Lansia terlebih pada daerah Kecamatan Metro Pusat (Dinda & Fitra, 2017). Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan di Kota Denpasar bahwa untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia diperlukan kesiapan berupa peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dan memerlukan dukungan dari aspek sosial agar Kota Ramah Lansia dapat terwujud dengan baik (Lestari, 2016).

Kota Ramah Lansia di Kota Bekasi mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk pemenuhan indikator-indikator yang sesuai dengan WHO. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi indikator-indikator tersebut diperlukan model holistic dan intergratif yang partisipatif-kolaboratif agar dapat terwujudnya Kota Ramah Lansia yang baik. Selain itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk pengambilan dalam menjalankan peran dari masing-masing yang mencangkup indikator-indikator Kota Ramah Lansia WHO (Musa, 2016). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ni Wayan Suriastini, dkk. (2013) di Kota Malang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia. Kota Ramah Lansia dapat terwujud apabila dapat memenuhi indikator-indikator ramah lansia WHO dan peningkatan pada infrastruktur maupun pengimplementasian kebijakan yang berkaitan dengan lansia agar dapat berjalan dengan baik.

Kota Ramah Lansia tidak hanya berusaha diwujudkan di Indonesia. Kota Ramah Lansia juga mendapatkan perhatian khusus untuk sesegera mungkin diwujudkan di negara-negara lain, salah satunya di Palo, California. Lansia sangat begitu diperhatikan di kota ini, terlebih lagi untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian para lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan pembangunan untuk ruang terbuka, transportasi umum dan layanan kesehatan agar nantinya lansia di kota tersebut dapat terbedayakan secara merata. (Ruza, 2015). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian di Guanajuato, Meksiko (Lambrinos, 2013) yang menyatakan bahwa Kota Ramah Lansia dapat terwujud apabila terdapat kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pembuatan kebijakan jangka panjang, penyediaan infrastruktur yang ramah lansia, hingga peningkatan pada pelayanan kesehatan. Kota Ramah Lansia nantinya dapat terwujud dan penduduk dapat memperoleh manfaatnya secara lebih optimal.

Pembahasan mengenai Kota Ramah Lansia tidak hanya fokus melibatkan pemerintah saja, melainkan juga pembahasan mengenai pihak dari luar pemerintahan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Scharlach (2012) yang membahas bahwa keterlibatan komunitas lansia menjadi dorongan kota tersebut dapat mewujudkan Kota Ramah Lansia yang baik dan optimal. Tidak mudah mewujudkan Kota Ramah Lansia karena terdapat berbagai tantangan di dalam mewujudkannya. Tantangan tersebut disebutkan pada penelitian Tine Buffel dan Chris Philipson (2016) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Kota Ramah Lansia memiliki beberapa tantangan yang harus diatasi dengan baik. Penelitian ini

juga membahas terkait *ageing population* yang menjadi isu dari Pengembangan Kota Ramah Lansia.

Ageing population dan bonus demografi menjadi sebuah isu yang mendasari adanya Pengembangan Kota Ramah Lansia. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan pembahasan tersebut, Penelitian Heryanah (2015) membahas dan menghasilkan temuan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan program yang dapat mendukung dan mengatasi isu demografi tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nur Falikha (2017) tentang bonus demografi bahwa pemerintah tidak hanya fokus kepada penciptaan program, tetapi juga harus fokus pada pengembangan potensi penduduk terutama usia muda untuk mampu memanfaatkan peluang tersebut.

Penelitian Joko Tri Haryanto (2015) juga turut membahas tentang kondisi penduduk lansia dan bonus demografi kedua yang menghasilkan temuan bahwa pemerintah harus menciptakan sebuah program yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih kompetitif untuk mendukung pembahangunan nasional ke depannya. Penelitian Eka Afriana Djamhari, dkk (2020) mengenai kondisi lansia dan perlindungan sosial lansia menghasilkan temuan bahwa diperlukan seperangkat peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan lansia sebagai payung hukum untuk pelaksanaan program untuk lansia.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa isu mengenai *ageing population* tidak hanya berkembang di Indonesia, melainkan juga menjadi isu yang mendunia. Setiap negara berusaha mengatasi isu tersebut dengan

melakukan berbagai upaya untuk memberikan kehidupan yang nyaman bagi para masyarakat lanjut usia dalam menghadapi usia senja dan Kota Ramah Lansia menjadi sebuah konsep kota yang selalu berusaha untuk diwujudkan di masa depan. Pembentukan kota tersebut nantinya tidak hanya memberikan keuntungan bagi lansia saja, melainkan juga turut mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum mengingat bahwa kota yang baik adalah kota yang mampu memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Kota Ramah Lansia sangatlah penting untuk diwujudkan.

1. 5. 2 Administrasi Publik

Administrasi Publik memiliki banyak definisi, dimulai dari Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) mengemukakan mengenai administrasi publik yang diartikan sebagai sumber daya yang berproses dalam melakukan formulasi, implementasi, serta mengelola keputusan kebijakan publik dengan cara diorganisir atau dikoordinasikan. Bahkan, dapat diartikan dengan makna lain yaitu sebagai sebuah seni dan ilmu (*art and science*) karena bertujuan untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dan mengatur *public affairs*. McCurdy (dalam Keban 2014:3) memberikan pendapat lain mengenai pengertian administrasi publik. Ia mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan bentuk metode yang dilakukan oleh negara dalam memerintah hingga termasuk cara atau bentuk untuk melakukan fungsi negara secara prinsipil.

Dengan demikian, administrasi publik merupakan persoalan politik yang akan selalu berkembang dan tidak dapat dipisahkan. Para ahli politik juga seringkali

mengartikan “birokrasi” sebagai pengganti dari administrasi publik menurut Kettl (dalam Keban, 2014:4). Nicholas Henry (dalam Pasolog, 2019) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan bentuk dari sebuah kombinasi yang rumit antara teori dan praktik yang tujuannya untuk mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah terhadap masyarakat sehingga nantinya menjadi upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar dapat menyesuaikannya dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan masyarakat secara lebih baik.

Berbeda lagi dengan pendapat yang dikemukakan oleh Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (dalam Pasolog, 2019:9) yang mendefinisikan administrasi publik, yaitu:

1. Bentuk bekerjasama suatu kelompok pada sebuah lingkungan di lingkup pemerintahan
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan di antara mereka
3. Memiliki posisi penting untuk merumuskan kebijakan pemerintah karena ini menjadi salah satu sebagian dari proses politik
4. Memiliki hubungan yang erat dan saling mengaitkan berbagai macam pihak, baik itu swasta maupun perindividu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Berdasarkan dari uraian berbagai pendapat tentang pengertian dari administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu cara sumber daya untuk melakukan pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan mengingat bahwa tujuan tersebut memiliki ruang lingkup yang erat dengan dunia politik. Makna dari administrasi publik memiliki variasinya tersendiri apabila dilihat dari berbagai pandangan dari berbagai pendapat para ahli. Variasi tersebut dapat berasal dari kata “publik” dan juga dapat berasal dari kata “administrasi publik”. Namun, yang seringkali didapati adalah makna administrasi publik sebagai *administration for public* atau *administration by public*. *Administration of public* memiliki orientasi berupa masyarakat menjadi aktor yang pasif dan harus tunduk untuk menerima apa yang dilakukan pemerintah karena pemerintahlah yang menjadi aktor tunggal.

Berbeda dengan pengertian dari *administration by public* yang memiliki orientasi berupa pemerintah memberikan layanan publik (*service provider*) dan masyarakatlah yang memiliki peran aktif. Masyarakat di sini berpartisipasi secara optimal dan pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan, memberikan layanan publik, serta memfasilitasi masyarakat dengan baik sehingga akibat dari peran yang mereka lakukan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik. Perkembangan variasi makna yang menarik untuk dijadikan bahan ilmu mengingat bahwa paradigma yang awalnya paling tidak demokratis berubah menjadi paling demokratis.

Berdasarkan berbagai bentuk administrasi publik yang telah diartikan tersebut, dapat terlihat jika administrasi publik memiliki keterkaitan dengan penelitian. Hal

ini karena administrasi publik hadir sebagai sebuah gerakan pemerintah untuk memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat di masyarakat, salah satunya isu mengenai masyarakat lanjut usia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia diperlukan pemahaman dari ilmu administrasi publik untuk tetap berpedoman pada dasar dari gerakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.

1. 5. 3 Kebijakan Publik

Terdapat banyak macam variasi yang lahir dari berbagai literatur untuk mendefinisikan pengertian dari kebijakan publik. Penyebab dari banyaknya variasi tersebut berasal dari cara pandang penulis yang tidak terbatas sehingga menghasilkan definisi "*policy*". Secara umum, kebijakan publik diartikan sebagai sebuah keputusan yang telah ditetapkan dan dibentuk oleh badan-badan dan pejabat pemerintah, yang memiliki tujuan sebagai upaya dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh publik, seperti masalah peningkatan penduduk (Purnaweni, 2014:55).

Definisi lain mengenai kebijakan publik juga diungkapkan oleh James E. Anderson (dalam Subarsono 2005:2) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah kebijakan yang diterapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan sebuah pilihan kebijakan yang dibentuk oleh pejabat atau badan pemerintah dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, sosial, dan sebagainya. Terdapat kesamaan pendapat dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2012:4) bahwa kebijakan publik merupakan sebuah arah tindakan yang telah dibentuk oleh aktor yang berkelompok

maupun perseorangan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan. Easton (dalam Taufiqurokhman, 2014:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebagai bentuk untuk mengalokasikan nilai-nilai dengan sifat yang memaksa kepada seluruh masyarakat. Pendapat tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Laswell dan Kaplan (dalam Taufiqurokhman 2014:3) yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai bentuk suatu program untuk mencapai sebuah tujuan, nilai-nilai, melalui sejumlah praktek-praktek yang memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

W.I. Jenkins (dalam Solichin 2012:15) selaku pakar dari Inggris menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk dari adanya serangkaian keputusan yang telah diputuskan oleh sekelompok maupun perseorangan aktor sesuai dengan situasi dan tujuan yang ingin dicapai sehingga keputusan tersebut saling berkaitan antar satu sama lain. Selanjutnya, Carl Friedrich (dalam Mustari 2015:15) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk kesempatan maupun usulan dari perseorangan maupun kelompok di dalam pemerintahan karena adanya serangkaian tantangan yang menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga keputusan tersebut menjadi sebuah solusi pemerintah untuk mampu mengoptimalkan perealisasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pendapat tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Charles Lindblom (dalam Mustari 2015:16) kebijakan publik yang diartikan sebagai bentuk serangkaian keputusan yang dibentuk oleh sejumlah individu maupun kelompok pemerintahan yang lahir dari serangkai proses politik yang amat kompleks dan analitis. Kebijakan publik (Muchlis Hamdi 2013:53) merupakan sarana sekaligus pembingkai pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintahan.

Kebijakan publik pada akhirnya memiliki sebuah sifat untuk menjadi suatu landasan pemerintah untuk memberikan arahan sesuai dengan misi pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintahan tersebut.

Dengan demikian, terdapat kesamaan pendapat mengenai kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas Dye (dalam Subarsono 2005:2) bahwa kebijakan publik sebagai bentuk pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu apabila dihadapkan di suatu persoalan publik. Dalam hal ini, baik atau tidaknya kebijakan tidak hanya dinilai melalui pendapat maupun ide dari para administrator pemerintahan, akan tetapi kebijakan yang baik adalah kebijakan yang juga berisikan pendapat serta tuntutan dari opini publik mengingat bahwa kebijakan dibentuk demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, mengingat bahwa membentuk kebijakan perlu melihat dari berbagai sudut pandang maka perlu memahami pembagian proses kebijakan melalui tahap-tahap yang dilihat dari berbagai faktor dan pertimbangan. Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik – praktik sosial yang terarah dan ada dalam masyarakat (dalam Taufiqurohman, 2014) sehingga kebijakan publik harus disesuaikan dengan praktek-praktek sosial yang telah lahir dan berkembang di masyarakat dan tidak boleh memiliki sifat yang bertentangan dengan praktek sosial tersebut.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik tersebut, dapat diketahui bahwa administrasi publik berkaitan dengan penelitian. Hal ini karena kebijakan publik merupakan salah satu bentuk modal legal yang dibutuhkan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan yang telah menyesuaikan dengan pedoman dan tujuan yang

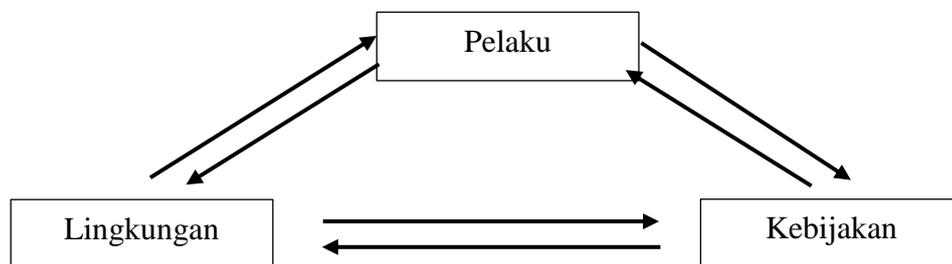
ditetapkan. Selain itu, kebijakan publik juga menjadi sebuah landasan pemerintah untuk mampu membentuk inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan itu, kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk menghadapi isu demografi berupa *ageing population* dan bentuk inovasi baru tersebut terwujud dalam Pengembangan Kota Ramah Lansia untuk menghadapi isu tersebut di masa mendatang.

1.5.3.1 Sistem Kebijakan Publik

Kebijakan juga dipandang dalam suatu sistem sehingga diartikan sebagai sekumpulan bagian-bagian yang mengaitkan satu sama lain dan saling bergantung dengan cara tertentu sehingga memungkinkan mereka bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan yang menguntungkan sehingga saling memberikan timbal balik antara tiga unsur tersebut menurut William Dunn (2003). Berikut merupakan gambaran mengenai hubungan dari tiga unsur tersebut:

Gambar 1 1

Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber: William Dunn, 2003

Berdasarkan pada gambar 1.1, segitiga sistem kebijakan tersebut memberikan penjelasan mengenai ketiga sistem yang saling mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh masing-masing komponen sistem. Sistem kebijakan adalah susunan kelembagaan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menyediakan penanganan di berbagai aspek antar elemen kebijakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn (dalam Sawir, 2021; Anggara, 2014; Subarsono, 2005), sebagai berikut:

a Kebijakan Publik (*policy policies*)

Penetapan keputusan yang dilakukan oleh sejumlah atau serangkaian pilihan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan suatu tujuan yang ditetapkan. Keputusan tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan, baik itu keputusan untuk melakukan sesuatu maupun tidak.

b Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*)

Aktor kebijakan diartikan sebagai individu atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan pemberian pengaruh maupun untuk dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan dapat termasuk partai politik, lembaga pemerintahan, sekelompok warga, atau kelompok lainnya.

c Lingkungan kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan adalah lingkungan khusus di mana suatu kebijakan tengah berlangsung sehingga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan pemerintah itu sendiri.

Dengan kata lain, melalui uraian yang telah dijelaskan di atas penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh William Dunn. Pemilihan teori tersebut dilakukan setelah peneliti melakukan studi pustaka mengenai permasalahan yang akan diteliti sehingga penelitian mengenai Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia dapat dianalisis sesuai dengan yang telah terjadi secara langsung di lapangan dan nantinya dapat menghasilkan sebuah solusi-solusi sebagai bentuk upaya untuk mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

1. 5. 4 Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia (Lansia) diartikan sebagai individu dengan usia yang telah memasuki usia senja, yaitu usia di atas 60 tahun. Penuaan merupakan proses perjalanan kehidupan yang berada di tingkat akhir (Ariwibowo, 2019). Bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah perjalanan kehidupan manusia secara berkesinambungan dan akan dirasakan oleh setiap individu. Menurut Nugroho dan Abikusno (dalam Ekasari, 2018) perubahan yang dialami tidak hanya perubahan yang tampak di mata seperti fisik, tetapi juga perubahan yang tidak kasat mata, seperti mental dan sosial. Sejalan dengan pendapat Hamid (dalam Ekasari, 2018) bahwa proses penuaan tersebut tidak dapat dihindari dan pada masa itulah para individu hanya ingin merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih di dekatnya. Dengan demikian, perlindungan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan lansia secara lahir dan batin sangat diperlukan. Hal ini juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang berisikan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang

bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. 5. 5 *Age Friendly City* (Kota Ramah Lansia)

Age Friendly City atau Kota Ramah Lansia adalah bentuk pengembangan kota yang fokus terhadap lingkungan dengan aksesibilitas dan inklusifitas yang baik dan nyaman, memberikan mengoptimalkan untuk mengupayakan terbentuknya peluang yang besar terhadap kesehatan, partisipasi, maupun keamanan agar kualitas hidup dapat tercapai dengan optimal meski usia telah memasuki usia senja atau mengalami penuaan (WHO, 2015). Pengertian mengenai kota yang ramah lansia sudah menjadi sebuah topik yang banyak dirumuskan di berbagai dokumen, salah satunya pada dokumen deklarasi MIPAA (*Madrid International Plan of Action on Ageing*) 2012 (Ariwibowo, 2019) merumuskan dimensi ramah lansia yang terdiri dari tiga pilar:

1. Memperluas partisipasi penduduk lansia dalam pembangunan negara
2. Memberikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan sosial bagi lanjut usia
3. Memberikan dan menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung lansia yang masih produktif untuk tetap merasa nyaman dan aman.

Indonesia turut menandatangani deklarasi ini karena sesuai dengan UU No 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. *Age Friendly City* memiliki prinsip dasar sebagai berikut (WHO, 2015):

- a *Equity* (kesetaraan)

Tidak terdapat perbedaan pelayanan dari segi fisik maupun sosial sehingga seluruh masyarakat termasuk lansia mendapatkan pelayanan yang baik tanpa memiliki kesenjangan di dalamnya (WHO, 2015).

b *Accessibility of the physical environment* (aspek fisik yang aksesibel)

Penyediaan pelayanan publik yang menyesuaikan kebutuhan para lansia mengingat bahwa kemampuan masyarakat yang semakin menua akan semakin menurun kemampuannya untuk beraktivitas. Oleh karena itu, pelayanan tersebut terwujud dalam penyediaan sarana prasarana yang ramah lansia, seperti toilet khusus lansia, jalan yang memiliki pegangan di sepanjang lorong, dan sebagainya (WHO, 2015).

c *Inclusiveness of the social environment* (aspek sosial yang inklusif)

Pada lingkungan bermasyarakat, lansia tidak mengalami diskriminasi dan mendapat layanan serta dukungan sosial sehingga lansia merasa nyaman dan aman untuk tetap berada di lingkup masyarakat tanpa merasa dikucilkan (WHO, 2015).

Age Friendly City atau Kota Ramah Lansia juga memiliki delapan indikator yang dikeluarkan WHO (dalam Musa 2013:63) yang terdiri atas delapan indikator di antaranya:

1 Ruang terbuka dan bangunan (*outdoor spaces and buildings*).

Ruang terbuka serta bangunan meliputi lingkungan yang bersih sehingga dapat memberikan kedamaian saat melakukan aktivitas di tempat tersebut, taman kota yang nyaman dengan penyediaan jalan setapak

yang tidak licin untuk memberikan keamanan dan bangunan dengan aksesibilitas yang baik dan toilet umum yang bersih.

2. Transportasi (*transportation*)

Transportasi mencakup jadwal transportasi yang tepat waktu, tempat duduk prioritas untuk lansia, kendaraan dengan tangga rendah dan lantai rendah, tempat duduk yang nyaman, pengemudi yang sopan dan sabar, informasi yang jelas dan lahan parkir yang mudah diakses dekat gedung.

3. Perumahan (*housing*).

Hunian yang menyenangkan, kemudahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, desain hunian yang menyenangkan, serta dapat diatur sesuai dengan keinginan para lansia (misalnya penurunan teras yang rendah, fasilitas yang mudah diakses, pegangan tangan di kamar mandi), dan desain yang menarik bagi lansia.

4. Partisipasi sosial (*social participation*).

Partisipasi sosial meliputi menyediakan tempat bagi lansia berkumpul untuk mengikuti kegiatan seperti pemindahan lansia menuju tempat yang lebih aman dan nyaman, menerima perawatan kesehatan dan psikologis bagi para lansia, serta melakukan komunikasi dengan para lansia lainnya yang sebaya untuk saling membagikan wawasan dan informasi tentang kegiatan lansia lainnya.

5. Penghormatan dan penghargaan dari lingkungan sosial (*respect and social inclusion*).

Diharapkan masyarakat menghormati orang tua, terutama generasi mudanya. Lansia dapat diberikan perhatian khusus, bantuan aktivitas, dan mendapat dukungan dari kaum muda, seperti dengan mengantri lebih awal dan diperlakukan dengan sopan.

6. Partisipasi dan pekerjaan (*civil participation and employment*).

Singkatnya, tidak semua kondisi lansia itu rentan, kebanyakan dari mereka masih kuat dan potensial sehingga membutuhkan kegiatan yang sesuai dengan keadaannya. Oleh karena itu, undang-undang yang memiliki fokus terhadap penanganan lansia akan memberikan dukungan kepada para lansia untuk tetap mampu berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan bersosial.

7. Komunikasi dan informasi (*communication and information*).

Lansia diharapkan dapat mengakses dan menerima informasi yang mereka butuhkan melalui pertemuan-pertemuan publik di pusat-pusat komunitas. Komunikasi ini diharapkan dalam dengan bentuk ejaan atau bahasa yang telah disederhanakan. Bahkan, akan lebih baik jika informasi tersebut dibagikan dalam bentuk cetak seperti *leaflet* maupun brosur yang cukup jelas dan menarik dengan penuh gambar untuk dibaca oleh lansia dan masyarakat.

8. Layanan kesehatan (*community and health services*).

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang dapat dengan mudah para lansia jangkau, adanya kendaraan umum memberikan dukungan kemudahan kepada mereka untuk bepergian menuju fasilitas kesehatan

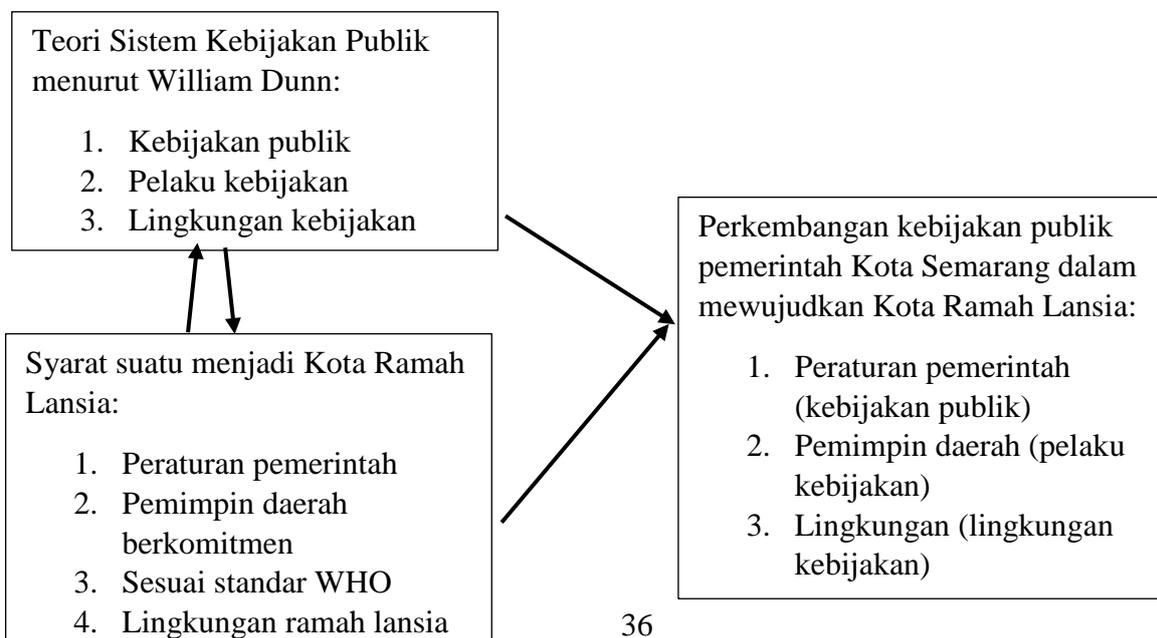
yang telah disediakan oleh pemerintah. Sistem pelayanan dan telah terintegrasi akan memudahkan lansia dalam mendapatkan pengobatan.

Untuk menjadi sebuah Kota Ramah Lansia, diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Hermawati, 2015, Vibriyanti, 2018; Aribowo, 2019):

1. Terdapat seperangkat peraturan yang dimiliki oleh kota tersebut yang mengatur secara khusus mengenai perlakuan, penanganan, maupun perlindungan terhadap para lansia.
2. Memiliki pemimpin daerah dan memiliki keterlibatan komitmen dan kepedulian yang besar terhadap lansia.
3. Memiliki metode dokumen yang ramah lansia sebagaimana diatur dalam ketetapan WHO, namun disesuaikan dengan keadaan daerah yang bersangkutan
4. Penyediaan fasilitas yang ramah dan menyesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan lansia agar dapat terus beraktivitas dengan nyaman dan aman.

Gambar 1 2

Kerangka Teori

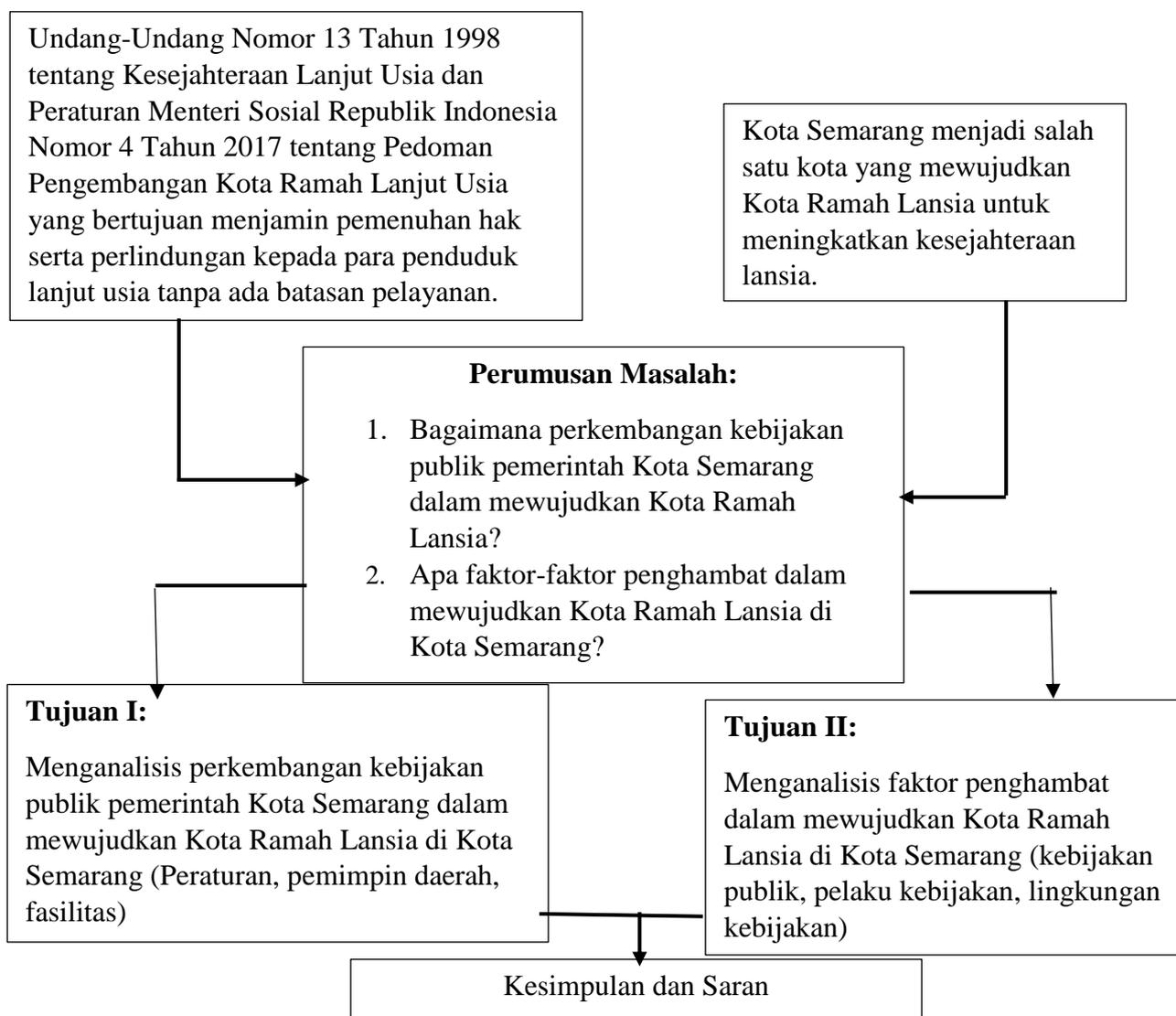


Sumber: Olahan Penulis, 2023.

1. 5. 6 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1 3

Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Olahan Penulis, 2023.

1. 6 Operasionalisasi Konsep

Kota Ramah Lansia adalah sebuah bentuk pengembangan kota yang fokus terhadap lingkungan dengan aksesibilitas dan inklusifitas yang baik dan nyaman, memberikan mengoptimalkan untuk mengupayakan terbentuknya sebuah peluang yang besar baik itu kesehatan, partisipasi, maupun keamanan agar kualitas hidup dapat tercapai dengan optimal meski usia telah memasuki usia senja atau mengalami penuaan. Berbagai keterbatasan dan permasalahan mengenai lansia mendorong pemerintah untuk berusaha mewujudkan Kota Ramah Lansia di daerahnya masing-masing melalui berbagai program untuk menyejahterakan lansia.

Suatu kota dapat menjadi sebuah Kota Ramah Lansia apabila telah memenuhi empat syarat di antaranya, memiliki seperangkat peraturan yang mengatur tentang lansia, memiliki pemimpin daerah yang memiliki keterlibatan komitmen dan kepedulian yang besar terhadap lansia, memberikan metode dokumen ramah lansia sebagaimana diatur dalam peraturan WHO namun disesuaikan dengan kondisi di daerah yang bersangkutan, serta menyediakan fasilitas yang ramah terhadap lansia agar lansia dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman.

Penelitian ini menganalisis perkembangan pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia sejak tahun 2018 dengan melihat dimensi peraturan, pemimpin daerah, dan lingkungan menurut WHO (dalam Hermawati, 2015, Vibriyanti, 2018; Aribowo, 2019). Pada penelitian ini menggunakan teori sistem kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn, dengan melihat kesesuaian antara indikator kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan

kebijakan. Indikator ini digunakan dengan maksud untuk menganalisis gejala fenomena perkembangan pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia yang memfokuskan pada peraturan, pemimpin daerah, dan lingkungan. Oleh karena itu, operasionalisasi konsep yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1. 7
Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala	Narasumber
1	Kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam Mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang	Peraturan	1. Peraturan yang mengatur tentang lansia 2. Program apa saja yang mengatur tentang lansia	Bappeda BKKBN Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Pemimpin Daerah	1. Pemimpin daerah yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap lansia 2. Memiliki tujuan dan target untuk peningkatan kualitas lansia	Bappeda BKKBN Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Masyarakat
		Fasilitas Ramah Lansia	1. Penyediaan sarana prasarana yang ramah lansia, seperti taman ramah lansia, kursi khusus lansia, dan sebagainya	Bappeda BKKBN Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Masyarakat
2	Faktor – faktor penghambat pemerintah Kota Semarang dalam	Kebijakan Publik	Kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia.	Bappeda BKKBN Dinas Sosial Dinas Kesehatan

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala	Narasumber
	mewujudkan Ramah Lansia			Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelaku Kebijakan	1. Kemampuan mengatasi kendala 2. Komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat	Bappeda BKKBN Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Lingkungan Kebijakan	Kondisi daerah untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia	Bappeda BKKBN Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Sumber: Olahan Penulis, 2023.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada rasa keingintahuan peneliti terhadap perkembangan kebijakan dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Peneliti berpendapat bahwa terkait dengan hal tersebut, pemerintah harus fokus terhadap penanganan lansia untuk mendukung terwujudnya Kota Ramah Lansia yang dapat melindungi lansia secara optimal. Selayaknya kebijakan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang dilaksanakan atas inisiatif Bappeda Kota Semarang bekerjasama dengan berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat secara langsung dengan lansia untuk mampu mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Oleh karena itu, muncul sebuah pertanyaan, yaitu :

“Bagaimana perkembangan kebijakan publik pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia?”

Berdasarkan *Research Question* tersebut peneliti berusaha mencari tahu dengan membuat cabang permasalahan yang lebih spesifik, yaitu perkembangan kebijakan publik pemerintah dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang dengan menggunakan indikator peraturan, pemerintah daerah, fasilitas yang ramah lansia dan faktor-faktor penghambat mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang dengan menggunakan indikator kebijakan publik, pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan. Diharapkan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah tersebut dapat menjawab permasalahan mengenai pengimplementasian kebijakan dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia.

1. 8 Metode Penelitian

1. 8. 1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang seringkali digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi objektif secara alami sehingga peneliti dalam hal ini memiliki peran sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Tujuannya untuk melakukan penggambaran, pelukisan, serta menjelaskan suatu permasalahan yang diteliti dengan mempelajari secara optimal dan mendalami individu, kelompok, maupun peristiwa sehingga nantinya permasalahan penelitian dapat terjawab dengan baik.

1. 8. 2 Situs Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia, mengobservasi hingga menganalisis faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Lokus penelitian ini berfokus pada Kota Semarang karena Kota Semarang merupakan salah satu kota yang berkomitmen untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia dan telah menjadi *sample* pada Studi Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia 2013 yang dilakukan di 14 kota di seluruh Indonesia (Suriastini, 2013). Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengamati kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang.

1. 8. 3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan informan, *purposive sampling* menjadi sebuah teknik yang dipilih dalam penelitian ini karena informan tersebut dipilih sesuai dengan ketentuan maupun kriteria yang telah disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Adapun informan yang dipilih oleh peneliti berdasarkan penjelasan di atas adalah:

- a. BKKBN Jawa Tengah, yaitu pada Kepala Sub Urusan Keluarga Sejahtera
- b. Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu pada Kepala Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dan Kepala Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.

- c. Bappeda Kota Semarang, yaitu pada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
- d. Dinas Kesehatan Kota Semarang, yaitu pada Kepala Sie Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
- e. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- f. Lansia di Kota Semarang, yaitu lansia pensiun dan lansia produktif.

1. 8. 4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk data berupa teks, rangkaian kata, frasa, hingga simbol dengan penggambaran tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Instrumen atau alat penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri pada penelitian kualitatif agar mendapat data yang valid dan reliabel. Dengan demikian, peneliti harus mampu terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian (dalam Sugiyono, 2013). Dalam hal pengumpulan data dan informasi, digunakan alat perekam sebagai salah satu media pendukung saat wawancara berlangsung.

1. 8. 5 Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah bentuk subjek di mana peneliti akan mendapatkan data sehingga jika peneliti melakukan wawancara secara mendalam saat melakukan pengumpulan data, responden tersebut yang merupakan subjek dari penelitian yang memberikan respon balik terhadap

pertanyaan penelitian yang diberikan oleh peneliti (Arikunto, 2006). Terdapat dua jenis data dibedakan berdasarkan sumber dalam penelitian, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada (media cetak, foto, dll). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2013:113) adalah:

1. Data primer.

Memperoleh data secara langsung saat melakukan terjun lapangan melalui observasi area penelitian atau wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan berhubungan dengan perwujudan Kota Ramah Lansia dikenal sebagai data primer

2. Data Sekunder.

Memperoleh data dengan cara tidak langsung saat melakukan penelitian di lapangan sehingga peneliti memperoleh data tersebut dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari internet, buku, maupun jurnal yang relevan dengan Kota Ramah Lansia.

1. 8. 6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan dan telah disusun secara strategis sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mampu mendapatkan data yang sesuai (dalam Sugiyono, 2013). Selanjutnya, pengumpulan data tersebut memiliki beberapa teknik yang dapat dilakukan menurut Patton (dalam Moleong, 2013), di antaranya:

1. Wawancara/ *Interview guide*

Pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung melalui metode melakukan sesi pertanyaan terhadap informan dan nantinya informan tersebut akan memberikan informasi kepada peneliti sesuai pedoman wawancara. Wawancara juga diartikan sebagai pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan. Peneliti biasanya telah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk ditanyakan kepada informan sehingga nantinya dapat diperoleh data yang relevan dan akurat untuk mendukung penelitian. Kegiatan wawancara menjadi salah satu bentuk pembuktian dari data yang diperoleh melalui pencarian informasi secara mendalam melalui objek yang diteliti sehingga nantinya melalui wawancara tersebut dapat terlihat apakah informasi yang didapat memiliki kesesuaian atau bertolak belakang. Adanya pembuktian tersebut dapat memberikan keuntungan pada penelitian yang dilakukan peneliti menjadi lebih relevan dan sesuai.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah kegiatan pengumpulan data dengan melalui aktivitas tulis menulis seperti melakukan pencatatan terhadap data yang diperoleh atau yang telah tersedia. Dokumentasi juga merupakan penelusuran data secara historis sehingga memerlukan riset secara teliti

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan berbagai data yang dilakukan secara langsung dengan mengamati saat melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapat data yang dibutuhkan. Dokumentasi yang tersebut berasal dari catatan penting dari lembaga, organisasi ataupun perseorangan dengan syarat merupakan catatan yang terpercaya.

4. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang difokuskan pada kegiatan pencarian data dan informasi melalui telaah pustaka dan pengumpulan buku, penelitian terdahulu, dan referensi tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian data tersebut berkaitan dengan perwujudan Kota Ramah Lansia. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang administrasi publik, kebijakan publik, sistem kebijakan publik, lansia, dan Kota Ramah Lansia.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk mendapatkan data penelitian. Selain itu, penulis dalam melakukan wawancara menggunakan dengan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

1. 8. 7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data yang telah dilakukan dan didapatkan oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan data yang lebih

mudah untuk dipahami. Kegiatan analisis memiliki beberapa proses menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013) di antaranya:

a. Reduksi data

Kegiatan memilah, menyederhanakan, mentransformasi, dan menyederhanakan data yang diperoleh sebelumnya dari penelitian di lapangan agar nantinya data tersebut dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai.

b. Penyajian data

Kegiatan melakukan penyusunan data yang sebelumnya direduksi dengan kategorisasi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif. Proses penyajian data hasil wawancara dilakukan dengan penyusunan pada transkrip wawancara untuk tiap ide yang terdapat kesamaan pola dan tema sehingga dapat memberikan gambaran alamiah penelitian yang bersumber dari wawancara asli informan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dapat dikatakan sebagai sebuah kesimpulan awal dengan sifatnya yang sementara sehingga nantinya kesimpulan tersebut dapat berubah apabila ditemukan maupun tidak. Selanjutnya, kesimpulan akhir dari penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum ditemukan.

Setelah semuanya dilaksanakan maka kegiatan terakhir dalam analisa adalah menarik kesimpulan dari data tersebut dan semuanya tergantung dengan besarnya catatan data. Hasil wawancara yang telah didapat nantinya akan menjadi data pelengkap dan penguat argumentasi dari pihak terkait lalu dideskripsikan sesuai dengan pedoman wawancara.

1. 8. 8 Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan pemeriksaan data untuk memastikan baik dari proses maupun hasil yang didapat dari informan sudah dipahami secara benar oleh peneliti. Triangulasi data juga didefinisikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir di luar data tersebut, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (dalam Moleong, 2013). Terdapat beberapa kegiatan, di antaranya:

- a. Melakukan wawancara dengan informan secara mendalam.
- b. Informasi yang telah didapat dari informan dengan hasil observasi di lapangan dilakukan pengujian silang.
- c. Hasil yang telah diperoleh nantinya akan peneliti informasikan kepada informan dan sumber-sumber lain.

Menurut Denzin (dalam Nugrahani, 2014) terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu pengujian validitas data menggunakan perbandingan atau melihat kembali data yang didapatkan dari sumber yang berbeda.
2. Triangulasi metode, yaitu bentuk pengujian melalui pengecekan data dengan berbagai sumber yang sama, namun metode berbeda.
3. Triangulasi peneliti, yaitu pengujian dan pengecekan data dengan memanfaatkan peneliti lain untuk membantu mengurangi ketidakteelitian dalam mengumpulkan data sehingga hasil yang didapat antara peneliti satu dengan yang lain dapat dibandingkan.
4. Triangulasi teori, adalah proses analisis data penelitian melalui penggunaan beberapa teori yang relevan, seperti penganalisisan data dengan satu teori ke teori lainnya, penguraian hubungan dan penjelasan agar menemukan pembandingan yang jelas, memikirkan kemungkinan alternatif lainnya, dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk pengujian validitas data karena data dalam penelitian ini tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan dari banyak sumber yang memiliki potensi untuk mendukung informasi dan data yang relevan sesuai dengan fakta.